



2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

DINAS SOSIAL KOTA METRO

LAKIP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNya. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Kota Metro Tahun 2023 pada Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan Alhamdulillah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk dari pertanggung jawaban amanah dan telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagai kewajiban dari Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Selain sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP telah juga dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja di masa mendatang..

Implementasi dari pertanggung jawaban Akuntabilitas tersebut itulah yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang di dalamnya juga berupaya membuat penilaian yang obyektif sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi organisasi secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa apa yang kami hasilkan belum maksimal, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat untuk kita semua

Semoga LAKIP Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Metro, Februari 2024

Kepala Dinas Sosial Kota Metro



SRI AMANTO, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 1968042019930310009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Maksud dan Tujuan	I.2
1.3. Dasar Hukum	I.3
1.4. Gambaran Umum	I.5
1.5. Isu Strategis	I.15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Kinerja.....	II.17
2.2. Visi dan Misi.....	II.17
2.3. Tujuan dan Sasaran.....	II.19
2.4. Program	II.20
2.5. Perjanjian Kinerja	II.21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	III.22
3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	III.26
3.3. Realisasi Tahun Ini dan Tahun Lalu	III.34
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Renstra	III.41
3.5.. Perhitungan Indikator Sasaran Sesuai Dengan Indikator Kinerja Utama	III.48
3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Serta Solusi Yang Akan Direncanakan Dimasa Akan Datang	III.51
3.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III.53
3.8. Analisis Program/Kegiatan	III.54
3.9. Realisasi Anggaran	III.55
BAB IV PENUTUP	IV.83
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial, Kota Metro adalah suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang mengampu tugas dan fungsi dalam penanganan dan pengelolaan bidang sosial juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain itu, LAKIP mempunyai fungsi sebagai acuan dasar untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial Kota Metro di tahun yang akan datang. LAKIP juga sebagai suatu pemenuhan informasi yang menjadi bagian penting dalam informasi public yang transparan.

Reformasi birokrasi tidak semata bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melainkan juga mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan demokratis yang dilandasi nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Prinsip clean government dan good governance dalam reformasi birokrasi merupakan dua hal penting yang menjadi landasan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Diharapkan hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tentunya dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu instansi pemerintah yang akuntabel tentunya akan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan. Dengan demikian maka sangatlah perlu disusun sebuah laporan kinerja instansi pemerintah yang dilandasi oleh semangat reformasi birokrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka atas dasar tersebut pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dijadikan dasar dalam menyusun Laporan Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja/akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2023 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus, yaitu :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial, Kota Metro untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Kepala;
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Metro sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kota Metro dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Metro secara utuh dan menyeluruh. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, sarana dan prasarana yang memadai guna tercapainya pembangunan kesejahteraan rakyat dan mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks.

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat diperlukan pedoman yang mengarahkan secara baik, terarah, terencana dan terkendali sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mengendalikan dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan, sehingga laporan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program-program yang sama serta menentukan program-program baru yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada tahun - tahun berikutnya.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

- a. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Sosial Kota Metro dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
- b. Memberikann bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Dinas Sosial Kota Metro
- c. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Metro
- d. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
- e. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.
- f. Pemberian *reward* yang selayaknya kepada aparat pemerintah daerah yang berprestasi

1.3 Dasar Hukum

Dalam menyusun Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Metro memperhatikan berbagai peraturan perundang – undangan antaralain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 22/HUK/1997 tentang Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor .24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

1.4 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Metro

4.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kota Metro menyelenggarakan fungsi:

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 disebutkan Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Metro adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

B. Fungsi

Fungsi Dinas Sosial Kota Metro berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- e. Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan UPT Dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

4.2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengantugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan serta keuangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan produk hukum daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya Sekretaris membawahi :
 - A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 2. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 3. Melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
 4. Melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
 5. Melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
 6. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai; dan
 7. Melaksanakan Pengelolaan Data
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya
 - B. Perencana Ahli Muda

tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:

1. memformulasikan sajian untuk analisis;
2. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional; 5. menguji alternatif kriteria dan model;
5. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
6. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
7. menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
8. menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
9. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
10. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
11. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

C. Perencana Ahli Pertama meliputi:

1. mengidentifikasi permasalahan;
2. merumuskan permasalahan;
3. inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
4. inventarisasi dan identifikasi data primer;
5. mengolah data dan informasi;
6. mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
7. menganalisis data dan informasi;
8. menyajikan data dan informasi;
9. melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
10. melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan; dan
11. mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.

D. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah.

3. BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas, melaksanakan program dan kegiatan penanganan fakir miskin, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penghimpunan data dan informasi PMKS dan PSKS serta data penerima program jaminan sosial lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pemberian perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- c. Pengelolaan dan manajemen logistik bencana;
- d. Pelayanan publik terhadap penerima program jaminan sosial;
- e. Pemberian bantuan terhadap fakir miskin;
- f. Penyelenggaraan program penanganan fakir miskin perkotaan;
- g. Penghimpunan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta data pendukung lainnya;
- h. Pembinaan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat;
- i. Pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

a. Penyuluh Sosial Pertama

- Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu- isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah non rawan sosial;
- Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah non rawan sosial;
- Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok- kelompok organisasi di daerah non rawan sosial;

- Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
- Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas atau massal di daerah non rawan sosial;
- Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok – kelompok organisasi di daerah nonrawan sosial;
- Melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah nonrawan sosial;
- Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas - komunitas massal di daerah non rawan sosial;
- Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok - kelompok organisasi di daerah non rawan sosial;
- Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
- Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta

b. Penyuluh Sosial Muda

Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan proses penyuluhan sosial dan konsultasi penyuluhan sosial;

- melaksanakan proses penyuluhan sosial
- melaksanakan proses penyuluhan sosial dan konsultasi penyuluhan sosial
- melaksanakan proses penyuluhan sosial, konsultasi, evaluasi, dan pengembangan penyuluhan sosial
- melaksanakan proses penyuluhan sosial, penyusunan rencana strategis nasional, road map, pengembangan, dan inovasi penyuluhan sosial

4. BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Sosial memiliki tugas refungsionalisasi, rehabilitasi, pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- b. Melaksanakan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- c. Pelayanan terhadap permasalahan anak dan lanjut usia;
- d. Pemberian pelayanan terhadap penyandang diabilitas dan masyarakat yang mengalami ketunaan sosial;
- e. Pemberian pelayanan terhadap korban tindak kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO);
- f. Pengembangan terhadap lembaga kesejahteraan sosial(LKS);
- g. Upaya penanaman nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi social; dan
- h. Pembinaan peran serta masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam usaha kesejahteraan sosial.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

4.1 **Pekerja Sosial Pertama**

Uraian kegiatan tugas meliputi :

- menyusun rancangan kegiatan penjajakan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- menyusun materi sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- melaksanakan kegiatan sosialisasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas, dan pihak berpengaruh;
- menyusun instrumen identifikasi awal dan seleksi;
- menyusun rancangan kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- menyusun rancangan kegiatan kunjungan ke rumah (*home visit*) atau penjangkauan calon dan penerima program Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial;

- membuat rancangan kegiatan motivasi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara individu, keluarga, kelompok sasaran, dan dalam pertemuan sosialisasi di masyarakat;
- mereviu dan menganalisa hasil kegiatan temu bahas dalam penentuan kelayakan calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- melaksanakan kontrak pelayanan antara Pekerja Sosial dengan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- menyusun instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
- melaksanakan dan menyusun rancangan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
- menyusun rancangan kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program serta melaksanakan penyusunan rencana intervensi penerima program;
- mereviu dan menganalisa hasil kegiatan temubahas rencana intervensi penerima program;
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial;
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang jaminan sosial;
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang pemberdayaan sosial;
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang perlindungan sosial;
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan

4.2 Pekerja Sosial Ahli Muda, meliputi:

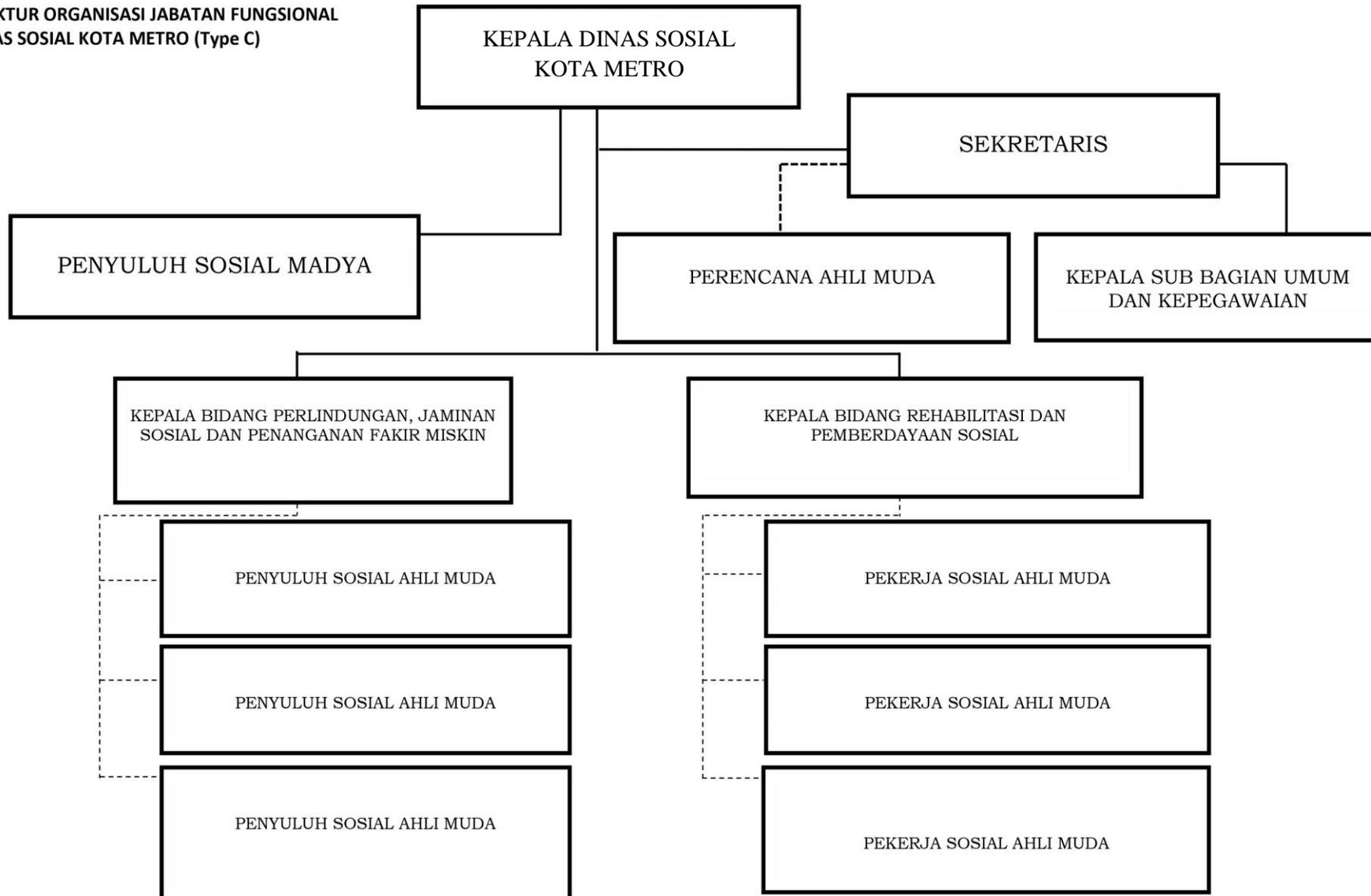
- menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan peninjauan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- menganalisa materi sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- menganalisa dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas, dan pihak berpengaruh;
- menganalisa dan evaluasi instrumen identifikasi awal dan seleksi;
- mengevaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan kunjungan ke rumah (*home visit*) atau penjangkauan calon dan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- melaksanakan evaluasi kegiatan pemberian motivasi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara individu, keluarga, kelompok sasaran, dan dalam pertemuan sosialisasi di masyarakat;
- menganalisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan;
- melaksanakan kontrak pelayanan antara Pekerja Sosial dengan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- menganalisa dan evaluasi instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
- menganalisa serta mengevaluasi kegiatan asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
- melaksanakan dan menganalisa serta mengevaluasi kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program;
- menganalisa dan evaluasi kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program;
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial serta menganalisa dan evaluasi kegiatan pemberian layanan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial;
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang jaminan sosial;
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang pemberdayaan

sosial;

- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang perlindungan sosial;
- melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang penanganan fakir;
- menganalisa dan evaluasi dokumen hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi;
- menganalisa dan evaluasi instrumen instrumen evaluasi hasil intervensi;
- melaksanakan kegiatan evaluasi pemberian layanan bagi penerima program dalam *setting* mikro dan mezzo;
- menganalisa dan evaluasi dokumen kegiatan temu bahas hasil kegiatan evaluasi intervensi;
- melakukan analisa mezzo terhadap penerima program dalam kegiatan terminasi;

TRUKTUR ORGANISASI JABATAN FUNGSIONAL
DINAS SOSIAL KOTA METRO (Type C)



1.5 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat beberapa isu strategis yang saat ini terjadi, yaitu:

MISI 2	Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
Isu strategis	1. Penanganan PPKS 2. Peningkatan Kualitas Data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dari isu strategis tersebut, diidentifikasi isu mana yang menjadi masalah dan prioritas untuk ditangani, menggunakan Metode USG (*Urgent, Seriousness and Growth*).

- *Urgensi*, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.
- *Seriousness* atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja.
- *Growth* atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.

Hasil identifikasi menggunakan Metode USG menunjukkan bahwa isu strategis “**Belum Optimalnya Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Metro**” merupakan yang prioritas untuk ditangani. Hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- **Urgent**, terjadi tiap hari, penanganan data PPKS merupakan kegiatan pokok di Dinas Sosial Kota Metro.
- **Seriousness**, mempengaruhi kinerja pelayanan publik. Semakin baik penanganan data PPKS maka akan semakin baik Dinas Sosial Kota Metro akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- **Growth**, jika tidak ditangani, kinerja pelayanan publik menjadi semakin menurun.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifatstrategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan,

dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Metro, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal, Secara umum permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Kota Metro berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bidang Sosial antara lain :

- Pemahaman tentang penyandang masalah sosial dan Potensi Sumber kesejahteraan sosial yang masih minim baik aparatur maupun masyarakat.
- Potensi dan sumber kesejahteraan sosial khususnya karang taruna belum maksimal pengembangannya.
- Kompleksitas masalah sosial yang semakin tinggi.
- Kemiskinan baik struktural maupun kultural yang semakin meningkat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Kinerja

RENSTRA Dinas Sosial Kota Metro merupakan perencanaan strategis jangka menengah yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kota Metro.

RENSTRA Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 – 2026 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kota Metro. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Metro dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat pencapaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Renstra Dinas Sosial Kota Metro dalam pelaksanaan kegiatan mendukung Visi dan Misi Wali Kota Metro, pada misi keempat sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Metro, sebagai berikut :

1.1 Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Metro serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial di Kota Metro, Dinas Sosial Kota Metro dalam programnya mengacu pada visi dan misi Kota Metro yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Metro diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Metro Tahun 2021–2026. Adapun rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan **Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat.

Melihat Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Sosial Kota Metro memiliki suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Sosial Kota Metro mendapatkan amanah untuk menjalankan Misi 2 (kedua) yaitu: “Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial “.

Adapun program prioritas ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah pada saat pemilihan dan disusun berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintah daerah. Program prioritas pembangunan tahun 2016-2021 bidang Sosial adalah :

- a. Perlindungan Sosial melalui program PKH dan Sembako
- b. Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat
- c. Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar
- d. Bantuan Usaha Keluarga Miskin di Daerah Slum Area (2 kelompok)
- e. Pelayanan, Perlindungan hukum bagi anak bermasalah dan Anak berhadapan dengan hukum
- f. Penanganan strategis tanggap darurat bencana.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan Adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kota Metro adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2021-2026
Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"										
NO	TUJUAN	SASARAN			INDIKATOR SASARAN	PENGUKURAN				
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial			Persentase PPKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara social										
Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Meningkatnya cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang ditangani	81,79%	85,3%	88,4%	91,5%	94,6%	97,7%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026 memiliki 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai, yakni :

Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat yang ditunjukan dengan Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena sustu hambatan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai.

Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan sasaran meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial (PPKS). Untuk perhitungan pencapaian tujuan indikator sasaran yang digunakan adalah Persentase PPKS yang tertangani, dengan rumus perhitungan :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$$

Adapun capaian target yang direncanakan adalah pada tahun 2021 sebesar 85,3%, tahun 2022 sebesar 88,4%, tahun 2023 sebesar 91,5%, tahun 2024 sebesar 94,6%, tahun 2025 sebesar 97,7% dan tahun 2026 sebesar 100%. Adapun perhitungan setiap peningkatan nilai persentase target pada tiap tahunnya merupakan penjumlahan atau akumulasi dari jumlah target yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

1.3 Program

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi serta kebijakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka program-program yang direncanakan pada Dinas Sosial Kota Metro terdiri dari :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”</i>			
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial			
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ▪ Meningkatkan jumlah dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ▪ Mengoptimalkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pelayanan data ▪ Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat ▪ Meningkatkan pelaksanaan program kesejahteraan sosial (Rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, jaminan sosial dan Penanganan fakir miskin) ▪ Mengoptimalkan upaya pemberdayaan stakeholder dalam penanganan masalah sosial ▪ Meningkatkan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024 sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	91.5 %

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Metro selaku atasan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Metro untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro 2021-2026 yang diimplementasikan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2023. Kegiatan Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kota Metro tahun 2021 dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis, serta program pembangunan, adapun ***perjanjian kinerja Tahun 2023 adalah Meningkatkan penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).***

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kota Metro maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan pengukuran akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun Anggaran 2022, menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result).

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Metro tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kota Metro, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kota Metro dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Sosial sebagai pengemban amanah masyarakat Kota Metro melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Metro yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Metro.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sebuah program, diperlukan indikator kinerja yang terukur. Dalam mengukur tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Metro menetapkan indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilannya, sehingga dapat mempermudah untuk pelaksanaan program, pengambilan keputusan dan dapat pertanggungjawabannya.

Dalam menetapkan tujuan sebuah program diperlukan indikator kinerja yang baik, sehingga diperlukan kejelian dan kecermatan. Dalam penetapan indikator kinerja digunakan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achivable, Realistic dan Timebond*) sebagai berikut :

- *Specific* : Tujuan harus jelas
- *Measurable* : Dapat diukur dengan suatu indikator
- *Achivable* : Dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki masyarakat
- *Realistic* : Masuk akal, dapat diterima oleh semua orang dalam forum dan sesuai dengan sumber daya yang ada
- *Timebond* : Dapat dicapai dalam batas waktu yang ditetapkan.

Pengukuran akuntabilitas kinerja memiliki arti sebagai pengukuran terhadap proses dan hasil dari sebuah program yang lazim juga disebut evaluasi kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dari sebuah program yang direncanakan dan akan dibandingkan dan

kesesuaiannya dengan hasil yang diperoleh, bahkan lebih jauh lagi terhadap manfaat dan dampaknya. Identifikasi Indikator Kinerja meliputi *Input* (masukan program), *Output* (keluaran), *Outcome* (hasil yang diharapkan), *Benefit* (manfaat yang diberikan) dan *Impact* (dampak dari program).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, rincian sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	85,3%	88,4%	91,5%	94,6%	97,7%	100%

Perhitungan Indikator Kinerja sebagai berikut :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$$

Jumlah PPKS

3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja, Target dan Realisasi program/kegiatan berjalan sebagai berikut:

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGAM/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
1	1.6	Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen
3			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	2 dokumen
4			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 dokumen	1 dokumen
5			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Laporan	2 Laporan
6			Administrasi Keuangan	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	23 ASN	23 ASN

7			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	26 ASN	26 ASN
8			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji	18 orang	18 orang
9			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan	15 Orang	15 Orang
10			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Laporan Leuangan Ahir Tahun	1 dokumen	1 dokumen
11			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen
12			Administrasi Umum	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah		
13			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor	20 jenis alat listrik	20 jenis alat listrik
14			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	3 jenis
15			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan makan Minum Kantor	85 jenis	85 jenis
16			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy	12 Jenis Barang Cetak & Penggandaan Surat	12 Jenis Barang Cetak & Penggandaan

17			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan surat Kabar dan majalah	8 Surat Kaabar	8 Surat Kaabar
18			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	17 kali	17 kali
19			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 Sub Kegiatan	
20			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor	300 Materai	300 Materai
21			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan	2 Jenis	2 Jenis
22			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang-barang Milik Daerah sebagai penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Sub Kegiatan	
23			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara	10 unit kendaraan	10 unit kendaraan
24			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	8 Peralatan	8 Peralatan
25			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang direhabilitasi	Perbaikan ruang data	Perbaikan ruang data
26			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
27			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya izin dalam pengelolaan undian berhadiah dan pengumpulan uang atau barang		

28			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah peserta sosialisasi PUB dan UGB	100 Peserta	100 Peserta
29			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah	4 Sub Kegiatan	
30			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas	30 orang	30 orang
31			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	5 orang	5 orang
32			Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / kota	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan;	10 orang	10 orang
33			PROGAM PENANGAN WARNA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			

34			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah kabupaten /Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan			
35			Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Orang	3 Orang
36			PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Terpenuhinya presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Bantuan Layanan Sosial		
37			Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam panti		
38			Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang
39			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang

40			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang
41			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang
42			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilita; jumlah peserta sosialisasi bagi keluarga penyandang disabilitas; terbentuknya komite penyandang disabilitas	UEP 10 org; sosialisasi keluarga penyandang disabilitas 30 org	UEP 10 org; sosialisasi keluarga penyandang disabilitas 30 org
43			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Keluarga yang diberikan Layanan	3 Orang	3 Orang
44			Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah anak yang menerima layanan	9 Orang	9 Orang
45			Pemberian Layanan Rujukan	Sistem Layanan Rujukan Terpadu(SLRT), Jumlah masyarakat yang menerima layanan		
46			Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	100 Orang dan 13 kegiatan	
47			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang
48			Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI dan Insentif PSM dan TKSK	10 Orang	10 Orang

49			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Anak-anak Terlantar yang memperoleh perlindunga dan Jaminan Sosial	20 Orang	20 Orang
50			Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar			
51			Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak -Anak yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten /Kota	30 Orang	30 Orang
52			Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan	9.205 Jiwa	9.205 Jiwa
53			Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah data fakir miskin per kelurahan yang terdata	9.205 Jiwa	9.205 Jiwa
54			Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverifikasi dan Tervalidasi	9.205 Jiwa	9.205 Jiwa
55			Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	terlaksanya bansos pangan sembako dengan baik	8000 kpm	8000 kpm
56			Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	kondisi ekonomi masyarakat berkembang	30 orang	30 orang
57			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial		
58			Perlindungan Sosial Korban Bencanan Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	100%	100%
59			Penyediaan makanan	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum	75 paket dan dapur untuk konsumsi 1000 orang	75 paket dan dapur untuk konsumsi 1000 orang

60			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang
61			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang
62			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang
63			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	100 Peserta	100 Peserta
64			Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Peserta Pelatihan TAGANA	30 Peserta	30 Peserta
65			PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Taman Makam Pahlawan		
66			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya TMP		
67			Pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	terpeliharanya dan tertatanya TMP kemala nusantara	1 paket	1 paket
68			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Peringatan hari-hari besar dan Talik Asih kepada para pejuang, warakawuri TNI & Polri	1 paket	1 paket

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Dinas Sosial Tahun 2023 ini terdapat 7 (Tujuh) Program ,15 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Dalam pelaksanaan program/kegiatan secara umum tidak mengalami kendala yang signifikan.

3.3. Realisasi Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu

Untuk mengetahui berapa besar peningkatan atau penurunan realisasi kinerja pada tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

PROGRAM 2022	Kegiatan/subkegiatan 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	PROGRAM 2023	Kegiatan/subkegiatan 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023
Program penunjang urusan pemerintahan an daerah kabupaten/ kota	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	163,06 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.64%
	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen
	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Laporan
	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	2 dokumen		Administrasi Keuangan	23 ASN

	kinerja SKPD				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26 ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 orang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Orang
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	2 Dokumen
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lakip dan LKPJ		Administrasi Umum	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 jenis alat listrik
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis
	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 orang		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85 jenis
	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 orang		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis Barang Cetak & Penggandaan Surat
	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 Surat Kaabar
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 kali
	Sub kegiatan Koordinasi dan	4 dokumen		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Pemerintahan Daerah	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Materai
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19 orang		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jenis
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit kendaraan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Peralatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79 jenis		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan ruang data
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 surat kabar		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 Peserta
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 kali		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 matrai		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota	5 orang
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jenis		Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / kota	10 orang
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	PROGRAM PENANGAN WARNA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah kabupaten /Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 unit		Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke desa / Kelurahan Asal	3 Orang
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung		Penyediaan permakanan	60 Orang
Program Pemberdayaan Sosial	Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	-		Penyediaan Sandang	4 Orang

	Sub Kegiatan Kordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pegumpulan uang atau barang	recofusing		Penyediaan Alat Bantu	20 Orang
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30 orang
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 PSM		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	UEP 10 org; sosialisasi keluarga penyandang disabilitas 30 org
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 TKSK		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3 Orang
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 lembaga sosial		Pemberian Layanan Kedaruratan	9 Orang
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52 orang		Pemberian Layanan Rujukan	
Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	-		Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	

	Panti Sosial				
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	1.485 lansia		Pemberian Layanan Kedaruratan	50 Orang
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	34 penyandang disabilitas		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten / Kota	10 Orang
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20 penyandang disabilitas			
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.093 KPM			
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	84 anak	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	20 Orang
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	refocusing		Penjangkauan Anak-anak Terlantar	30 Orang
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-		Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota	9.205 Jiwa
	Sub Kegiatan Pemberian	20 org terlantar		Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	9.205 Jiwa

	Layanan Kedaruratan				
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	recufusing		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	9.205 Jiwa
	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3.000 anggota LLI		Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	8000 kpm
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	30 orang
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	22 kelurahan			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.789 KPM	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	100%
Program Penanganan Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-		Penyediaan makanan	75 paket dan dapur untuk konsumsi 1000 orang
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	200 org		Penyediaan Sandang	100 Orang
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	17 org		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	500 Orang
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-		Pelayanan Dukungan Psikososial	50 Orang

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	15 org		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	100 Peserta
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	30 Peserta
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Paving block	PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya seluruh kegiatan		Pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	1 paket
				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 paket

Program , Kegiatan dan sub kegiatan tersebut diatas telah mengacu pada Kemendagri No.050.5881 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Renstra

Untuk mengetahui berapa besar realisasi kinerja pada tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Sosial Kota Metro tahun 2021-2026 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.3.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Renstra

PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	TARGET KINERJA PADA RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI RENSTRA TAHUN 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.64%	26.000.000	9.961.580
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	15.000.000	2.974.430
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	4.005.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Laporan	3.000.000	2.981.950
	Administrasi Keuangan	23 ASN	2.845.000.000	2.455.597.323
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26 ASN	2.500.000.000	2.162.335.103
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	200.000.000	217.800.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	90.000.000	62.560.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	40.000.000	45.206.470
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	100%	6.000.000	8.299.950
	Administrasi Umum	100%	240.000.000	220.060.277
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 jenis alat listrik	7.500.000	9.168.000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	16.000.000	19.366.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85 jenis	83.000.000	102.749.035
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis Barang Cetak & Penggandaan Surat	30.500.000	27.175.017
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 Surat Kaabar	23.000.000	19.572.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 kali	80.000.000	42.441.062
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	88.000.000	50.105.224
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Materai	22.000.000	3.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jenis	66.000.000	46.605.224
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		294.800.000	195.690.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit kendaraan	130.000.000	165.655.500

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Peralatan	14.800.000	15.575.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan ruang data	150.000.000	14.460.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	80%	510.000.000	390.405.300
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 org	40.000.000	12.546.800
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	80%	448.880.000	377.858.500
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	125.000	235.776.750
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota	5 orang	58.000.000	39.397.800

	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / kota	10 orang	148.000.000	102.683.950
PROGAM PENANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah kabupaten /Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan		80.000.000	-
	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke desa / Kelurahan Asal		30.000.000	-
PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	94,49%	1.557.000.000	834.059.927
	Penyediaan permakanan	60 Orang	153.214.425	57.456.750
	Penyediaan Sandang	4 Orang	14.000.000	21.365.000
	Penyediaan Alat Bantu	20 Orang	130.000.000	47.640.530
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30 orang	160.000.000	28.205.300
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	UEP 10 org; sosialisasi keluarga penyandang disabilitas 30 org	75.000.000	61.414.600
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3 Orang	240.000.000	74.450.200
	Pemberian Layanan Kedaruratan	9 Orang	105.058.548	25.874.700
	Pemberian Layanan Rujukan		64.188.322	22.859.900
	Rehabilitas Sosal Penyandang Masalah	99,20%	600.000.000	

	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan Napza di Luar Panti Sosial			494.792.947
	Pemberian Layanan Kedaruratan	50 Orang	35.000.000	67.677.080
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten / Kota	99,61%	235.000.000	427.115.867
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	20 Orang	663.000.000	180.861.485
	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	-	50.000.000	-
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota	9.205 Jiwa	450000000	66.593.185
	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	9.205 Jiwa	250.000.000	34.989.300
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	-	200.000.000	-
	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	97,13%	170.000.000	50.929.000
	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	94,50%	90.000.000	28.350.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	74,66%	198.000.000	89.594.594
	Penyediaan makanan	75 paket dan dapur untuk konsumsi 1000 orang	130.000.000	40.747.300
	Penyediaan Sandang	100 Orang	50.000.000	9.988.700

	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	500 Orang	40.000.000	17.542.200
	Pelayanan Dukungan Psikososial	50 Orang	30.000.000	8.714.800
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	100 Peserta	110.000.000	12.601.594
	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	30 Peserta	60.000.000	12.601.594
PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		450.000.000	399.088.210
	Pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	1 paket	175.000.000	399.088.210
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 paket	275.000.000	384.916.660

3.5. Perhitungan Indikator Sasaran Sesuai Dengan Indikator Kinerja Utama

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KOTA METRO

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023		Pagu anggaran 2023	Realisasi Pagu Anggaran 2023
			TARGET	REALISASASI		
1.	Persentase PPKS yang ditangani	Persen	91.50 %	92.78%	5.093.068.611	4.825.424.420

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI
	URUSAN SOSIAL	
01.	Perlindungan Jaminan Sosial Sub Kegiatan Fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	20
02.	Perlindungan Jaminan Sosial Sub Kegiatan Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga (sumber APBN Program sembako Kementerian Sosial)	7.587
03.	Program Penanganan Bencana (sumber APBD Kota Metro BLT Dampak negatif TPAS Karang Rejo)	503
04.	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	92
05.	Pemberian akses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas anak terlantar ,lansia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial (Program PKH)	4.443
06.	Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti Sub. Kegiatan pemberian layanan kedaruratan - Odgj : 6 orang, orang terlantar 20 orang & berobat keluar daerah 7 orang	33
07.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti	314
	- Penyedia makanan	100
	- Penyedia Sandang	100
	- Penyedia Alat bantu	11
	- Penyediaan Perbekalan Kesehatan (penyedia P3K)	50
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spirituan dan Sosial	10
	- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	10
	- Pemberian pelayanan Reunifikasi Keluarga	3

08.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di Luar Panti					171
	- Penyediaan layanan Kedaruratan / layanan Reaksi Cepat					20
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spirituan dan Sosial					60
	- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar / Fasilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan					10
	- Pemberian pelayanan Penelusuran Keluarga					5
	- Pemberian pelayanan Reunifikasi Keluarga					50
	- Layanan Rujukan					20
09.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar panti					139
	- Penyedia makanan					60
	- penyediaan sandang					30
	- Penyediaan Alat Bantu					10
	- Penyediaan Perbekalan Kesehatan (penyedia P3K)					30
10.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					21
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spirituan dan Sosial					10
11.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota					92
	- Penyedia makanan					50
	- penyediaan sandang					26
	- Pelayanan Dukungan Psikososial					14

Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Sosial Kota Metro menetapkan 1 (satu) Indikator

Kinerja Utama, yakni :

Berdasarkan tabel capaian diatas bahwa ppks yang tertangani adalah dapat di tetapkan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

jumlah ppks tahun 2023 sebesar 14.460.

1. persentase pps yang tertangani, dengan rumus perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{PPKS} &= \frac{\text{jumlah PPKS yang di tangani}}{\text{jumlah PPKS}} \times 100\% \\ \text{PPKS} &= \frac{13.415}{14.460} \times 100\% \\ \text{PPKS} &= 92.78\% \end{aligned}$$

2. Persentase PPKS yang tertangani, dengan rumus perhitungan :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$$

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 kondisi kinerja pada awal periode jumlah PPKS adalah sebesar 13.920 PPKS. Adapun jumlah PPKS yang tertangani didapat melalui kegiatan:

1. Perlindungan Jaminan Sosial Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
Capaian : 20 Orang
2. Perlindungan Jaminan Sosial Sub Kegiatan Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga (sumber APBN Kementerian Sosial)
Capaian: 7.587 Orang
3. Progam Penanganan Bencana (sumber APBD Kota Metro BLT Dampak negatif TPAS Karang Rejo)Capaian: 503 Orang

4. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota: 92
5. Pemberian akses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas anak terlantar ,lansia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial
Capaian : 4.443 Orang
6. Kegiatan rehabilitas sosial penyandang masalah (PMKS) lainnya bukan korban HIP/AIDS dan NAPZA diluar panti Sub.Kegiatan pemberian layanan kedaruratan Odgj : 6 orang, orang terlantar 20 orang & berobat keluar daerah 7 orang
7. Kegiatan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti : 314
8. Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di Luar Panti Capaian : 171 Orang
9. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar panti :139
10. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
Capain : 21
11. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota capaian : 92

3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Serta Solusi Yang Direncanakan Dimasa Akan Datang

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 terdapat kendala-kendala yang dihadapi :

1. Masih adanya perbedaan persepsi kriteria pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada petugas pendata..
2. Belum optimalnya Pelayanan dan Penanganan terhadap PPKS yang salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran.
3. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4. Belum optimalnya pengelolaan data dan Belum sempurnanya data base Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)
5. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan data PPKS.
6. Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan PPKS terutama yang mempunyai keahlian sosial (Sarjana Kessos)

Dalam hal capaian yang melebihi target terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian target adalah sebagai berikut :

- Indikator kinerja utama dinas sosial kota metro adalah presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), variabel PPKS itu sendiri terdiri dari 26 variabel yang tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial. Ada beberapa variabel dalam PPKS yang tidak masuk dalam program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Sosial Kota Metro. Masing – masing sub kegiatan yang mengampu variabel yang ada di PPKS terdapat target capaian yang menjadi tolak ukur capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kota Metro. Pada tahun 2023 hampir seluruh program, kegiatan sub kegiatan yang mengampu program PPKS mencapai target yang telah ditentukan
- Penambahan anggaran pada sector sub kegiatan yang mengampu kegiatan yang ada pada standart pelayanan minimal (SPM) sangat membantu dalam mencapai capaian yang menjadi target pada indikator kinerja utama (IKU).
- Penambahan jumlah sumber daya manusia baik dari aparatur sipil Negara maupun tenaga harian lepas (THL) walaupun jumlahnya tidak signifikan tapi sangat membantu dalam proses kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tolak ukur keberhasilan.
- Penambahan sarana prasarana penunjang program kegiatan dan sub kegiatan juga sangat mempengaruhi keberhasilan capaian masing – masing kegiatan.

3.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang ada di Kota Metro khususnya pada Dinas Sosial Kota Metro menjadi prioritas dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro. Dalam pelaksanaannya Dinas dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

3.7.1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi berupa implementasi program/kegiatan prioritas pada tahun 2023, Dinas Sosial Kota Metro melakukan efisiensi sumber daya berupa :

- Anggaran

Dinas Sosial Kota Metro telah melakukan efisiensi sumber daya berupa efisiensi anggaran dengan lebih Memprioritaskan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dalam hal ini Dinas Sosial salah satu Dinas pengampu SPM.

- Sumber Daya Manusia

Dalam hal penempatan sumber daya manusia (Aparatur) pada masing – masing Bidang pekerjaan Dinas Sosial Kota Metro lebih mengedepankan kompetensi / bidang ilmu yang dimiliki masing – masing Aparatur, harapannya apabila pekerjaan teknis tertentu dikerjakan oleh Aparatur yang sesuai dengan kompetensinya maka pekerjaan itu sendiri dapat selesai tepat waktu dan benar, secara tidak langsung akan tercapai efisien waktu dalam penyelesaian pekerjaan.

- Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan kinerja pegawai dibutuhkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pegawai Dinas Sosial, kebutuhan sarana dan prasarana pegawai yang disediakan telah sesuai kebutuhan pegawai untuk melaksanakan tugasnya masing – masing. hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi agar menjadi lebih optimal. Beberapa sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang pekerjaan para pegawai diantaranya adalah Komputer (Laptop), Printer, LED Proyektor, dan lain – lain.

3.8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Seluruh program/ sub kegiatan tahun 2023 secara implementatif telah terealisasi sesuai dengan perjanjian kinerja atau penetapan kinerja Tahun 2023. Dari tabel diatas hampir seluruh program dan sub kegiatan terlaksana sesuai dengan konsep perencanaan melampaui target,

Adapun beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian antara lain sebagai berikut :

- Adanya Dukungan dari Organisasi Pemerintah (Sentra Handayani) dibawah naungan Kementerian Sosial dalam rangka pemenuhan hidup layak bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
- Adanya peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial di dalam Penanganan anak yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup (pendidikan, kesehatan & kesejahteraan sosial).
- Pendampingan anak – anak yang bermasalah dengan hokum dan yang membutuhkan pendampingan khusus, dalam hal ini bersifat rahasia.
- Peranserta masyarakat dalam hal ini Relawan Sosial (PSM & TKSK) sebagai pihak yang turut serta dalam menunjang keberhasilan peningkatan kesejahteraan sosial.

- Tercapainya pemberdayaan bagi disabilitas melalui pelatihan dan bantuan UEP sehingga diharapkan disabilitas tersebut bisa mandiri secara ekonomi.

3.9. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Realisasi anggaran untuk Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023 menurut program/kegiatan prioritas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	KEGIATAN	Anggaran	Rencana
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.093.068.611	4.825.424.420
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.065.150.561	2.931.414.904
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.003.850	9.961.580
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.993.950	2.974.430
	Belanja Operasi	2.993.950	2.974.430
	Belanja Barang dan Jasa	2.993.950	2.974.430
	Belanja Barang	273.950	262.430
	Belanja Barang Pakai Habis	273.950	262.430
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	157.750	152.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	70.000	65.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.200	45.430
	Belanja Jasa	2.720.000	2.712.000
	Belanja Jasa Kantor	2.720.000	2.712.000

		Belanja Lembur	2.720.000	2.712.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4.015.950	4.005.200
	Belanja Operasi		4.015.950	4.005.200
	Belanja Barang dan Jasa		4.015.950	4.005.200
	Belanja Barang		273.950	263.200
	Belanja Barang Pakai Habis		273.950	263.200
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	157.750	152.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	70.000	65.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.200	46.200
	Belanja Jasa		3.742.000	3.742.000
	Belanja Jasa Kantor		3.742.000	3.742.000
		Belanja Lembur	3.742.000	3.742.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.993.950	2.981.950
	Belanja Operasi		2.993.950	2.981.950
	Belanja Barang dan Jasa		2.993.950	2.981.950
	Belanja Barang		273.950	268.950
	Belanja Barang Pakai Habis		273.950	268.950
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	157.750	157.750
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	70.000	65.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.200	46.200
	Belanja Jasa		2.720.000	2.713.000
	Belanja Jasa Kantor		2.720.000	2.713.000
		Belanja Lembur	2.720.000	2.713.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.567.723.836	2.455.597.323

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.274.125.986	2.162.335.103
	Belanja Operasi		2.274.125.986	2.162.335.103
	Belanja Pegawai		2.274.125.986	2.162.335.103
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		1.791.330.642	1.697.519.648
	Belanja Gaji Pokok ASN		1.417.686.957	1.357.067.846
		Belanja Gaji Pokok PNS	1.417.686.957	1.357.067.846
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		125.645.830	116.253.721
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	125.645.830	116.253.721
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		72.891.000	57.735.000
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	72.891.000	57.735.000
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		67.628.000	62.220.000
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	67.628.000	62.220.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		35.760.000	33.440.000
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.760.000	33.440.000
	Belanja Tunjangan Beras ASN		69.024.408	68.509.320
		Belanja Tunjangan Beras PNS	69.024.408	68.509.320
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		2.675.190	2.276.088
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.675.190	2.276.088
	Belanja Pembulatan Gaji ASN		19.257	17.673
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.257	17.673
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		482.795.344	464.815.455
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		280.746.674	271.555.157
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	280.746.674	271.555.157
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN		118.713.734	114.872.025
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	118.713.734	114.872.025
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN		1.012.288	1.012.288
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.012.288	1.012.288
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		82.322.648	77.375.985

		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	82.322.648	77.375.985
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		217.800.000	217.800.000
	Belanja Operasi		217.800.000	217.800.000
	Belanja Barang dan Jasa		217.800.000	217.800.000
	Belanja Jasa		217.800.000	217.800.000
	Belanja Jasa Kantor		217.800.000	217.800.000
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	213.000.000	213.000.000
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000	4.800.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		62.760.000	62.560.000
	Belanja Operasi		62.760.000	62.560.000
	Belanja Pegawai		35.760.000	35.560.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		35.760.000	35.560.000
	Belanja Honorarium		35.760.000	35.560.000
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	27.600.000	27.400.000
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	8.160.000
	Belanja Barang dan Jasa		27.000.000	27.000.000
	Belanja Jasa		27.000.000	27.000.000
	Belanja Jasa Kantor		27.000.000	27.000.000
		Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	6.000.000	6.000.000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	21.000.000	21.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.637.900	4.602.270
	Belanja Operasi		4.637.900	4.602.270
	Belanja Barang dan Jasa		4.637.900	4.602.270
	Belanja Barang		466.900	446.270

	Belanja Barang Pakai Habis		466.900	446.270
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	249.000	237.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	112.000	105.270
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	105.900	104.000
	Belanja Jasa		4.171.000	4.156.000
	Belanja Jasa Kantor		4.171.000	4.156.000
		Belanja Lembur	4.171.000	4.156.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		8.399.950	8.299.950
	Belanja Operasi		8.399.950	8.299.950
	Belanja Barang dan Jasa		8.399.950	8.299.950
	Belanja Barang		553.950	553.950
	Belanja Barang Pakai Habis		553.950	553.950
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	343.950	343.950
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	105.000	105.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	105.000	105.000
	Belanja Jasa		7.846.000	7.746.000
	Belanja Jasa Kantor		7.846.000	7.746.000
		Belanja Lembur	7.846.000	7.746.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		230.117.520	220.060.277
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.175.000	8.757.163
	Belanja Operasi		9.175.000	8.757.163
	Belanja Barang dan Jasa		9.175.000	8.757.163
	Belanja Barang		9.175.000	8.757.163
	Belanja Barang Pakai Habis		9.175.000	8.757.163

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	9.175.000	8.757.163
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		22.739.000	19.366.000
	Belanja Modal		22.739.000	19.366.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		22.739.000	19.366.000
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		4.225.000	4.125.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		4.225.000	4.125.000
		Belanja Modal Alat Pendingin	4.225.000	4.125.000
	Belanja Modal Komputer		18.514.000	15.241.000
	Belanja Modal Komputer Unit		10.000.000	10.000.000
		Belanja Modal Personal Komputer	10.000.000	10.000.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer		8.514.000	5.241.000
		Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	3.600.000	1.691.000
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.914.000	3.550.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		108.345.420	102.749.035
	Belanja Operasi		108.345.420	102.749.035
	Belanja Barang dan Jasa		108.345.420	102.749.035
	Belanja Barang		105.345.420	100.949.035
	Belanja Barang Pakai Habis		105.345.420	100.949.035
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.395.600	10.064.390
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	50.069.000	49.033.595
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.732.000	11.300.400
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.800.000	4.765.000
		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	28.348.820	25.785.650
	Belanja Jasa		3.000.000	1.800.000
	Belanja Jasa Kantor		3.000.000	1.800.000
		Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.000.000	1.800.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		27.260.100	27.175.017
	Belanja Operasi		27.260.100	27.175.017
	Belanja Barang dan Jasa		27.260.100	27.175.017
	Belanja Barang		27.260.100	27.175.017
	Belanja Barang Pakai Habis		27.260.100	27.175.017
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	-	-
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.610.500	15.562.917
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.649.600	11.612.100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		19.572.000	19.572.000
	Belanja Operasi		19.572.000	19.572.000
	Belanja Barang dan Jasa		19.572.000	19.572.000
	Belanja Jasa		19.572.000	19.572.000
	Belanja Jasa Kantor		19.572.000	19.572.000
		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.572.000	19.572.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		43.026.000	42.441.062
	Belanja Operasi		43.026.000	42.441.062
	Belanja Barang dan Jasa		43.026.000	42.441.062
	Belana Perjalanan Dinas		43.026.000	42.441.062
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		43.026.000	42.441.062
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.026.000	42.441.062
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60.397.355	50.105.224
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.500.000	3.500.000
	Belanja Operasi		3.500.000	3.500.000
	Belanja Barang dan Jasa		3.500.000	3.500.000
	Belanja Barang		3.500.000	3.500.000

	Belanja Barang Pakai Habis		3.500.000	3.500.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.500.000	3.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		56.897.355	46.605.224
	Belanja Operasi		56.897.355	46.605.224
	Belanja Barang dan Jasa		56.897.355	46.605.224
	Belanja Jasa		56.897.355	46.605.224
	Belanja Jasa Kantor		56.897.355	46.605.224
		Belanja Tagihan Telepon	2.911.755	789.259
		Belanja Tagihan Listrik	53.985.600	45.815.965
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		196.908.000	195.690.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		166.780.000	165.655.500
	Belanja Operasi		166.780.000	165.655.500
	Belanja Barang dan Jasa		166.780.000	165.655.500
	Belanja Jasa		4.900.000	3.829.550
	Belanja Jasa Kantor		4.900.000	3.829.550
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.900.000	3.829.550
	Belanja Pemeliharaan		161.880.000	161.825.950
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		161.880.000	161.825.950
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	139.680.000	139.636.750
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.200.000	22.189.200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15.630.000	15.575.000

	Belanja Operasi		15.630.000	15.575.000
	Belanja Barang dan Jasa		15.630.000	15.575.000
	Belanja Pemeliharaan		15.630.000	15.575.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		15.630.000	15.575.000
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000	4.239.000
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.840.000	5.826.000
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.520.000	5.510.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		14.498.000	14.460.000
	Belanja Operasi		14.498.000	14.460.000
	Belanja Barang dan Jasa		14.498.000	14.460.000
	Belanja Pemeliharaan		14.498.000	14.460.000
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		14.498.000	14.460.000
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.498.000	14.460.000
	Program Pemberdayaan Sosial		399.911.850	390.405.300
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		15.000.000	12.546.800
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		15.000.000	12.546.800
	Belanja Operasi		15.000.000	12.546.800
	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000	12.546.800
	Belanja Barang		7.223.000	6.787.800
	Belanja Barang Pakai Habis		7.223.000	6.787.800
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.755.400	2.475.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	184.800	180.000

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	757.800	757.800
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.525.000	3.375.000
	Belanja Jasa		3.825.000	3.825.000
	Belanja Jasa Kantor		3.825.000	3.825.000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.675.000	3.675.000
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	150.000	150.000
	Belanja Perjalanan Dinas		3.952.000	1.934.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		3.952.000	1.934.000
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	702.000	234.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.250.000	1.700.000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		384.911.850	377.858.500
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		235.908.500	235.776.750
	Belanja Operasi		235.908.500	235.776.750
	Belanja Barang dan Jasa		235.908.500	235.776.750
	Belanja Barang		5.508.500	5.376.750
	Belanja Barang Pakai Habis		5.508.500	5.376.750
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.402.700	2.392.950
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	189.000	182.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.566.800	2.551.800
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	350.000	250.000
	Belanja Jasa		230.400.000	230.400.000
	Belanja Jasa Kantor		230.400.000	230.400.000
		Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	230.400.000	230.400.000

	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		40.000.000	39.397.800
	Belanja Operasi		40.000.000	39.397.800
	Belanja Barang dan Jasa		40.000.000	39.397.800
	Belanja Barang		4.000.000	3.397.800
	Belanja Barang Pakai Habis		4.000.000	3.397.800
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.417.800	1.412.600
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	189.000	182.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.153.200	1.803.200
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	240.000	-
	Belanja Jasa		36.000.000	36.000.000
	Belanja Jasa Kantor		36.000.000	36.000.000
		Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	36.000.000	36.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		109.003.350	102.683.950
	Belanja Operasi		109.003.350	102.683.950
	Belanja Barang dan Jasa		9.003.350	2.683.950
	Belanja Barang		5.803.350	2.683.950
	Belanja Barang Pakai Habis		5.803.350	2.683.950
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.118.150	1.070.750
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	252.000	-
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.513.200	1.513.200
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100.000	100.000
	Belanja Hibah		100.000.000	100.000.000

	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		100.000.000	100.000.000
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		100.000.000	100.000.000
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000	100.000.000
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		3.000.000	-
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		3.000.000	-
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		3.000.000	-
	Belanja Operasi		3.000.000	-
	Belanja Bantuan Sosial		3.000.000	-
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		3.000.000	-
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu		3.000.000	-
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.000.000	-
	Program Rehabilitasi Sosial		882.701.400	834.059.927
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		383.901.000	339.266.980
	Penyediaan Permakanan		59.999.750	57.456.750
	Belanja Operasi		59.999.750	57.456.750
	Belanja Pegawai		2.820.000	2.820.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		2.820.000	2.820.000
	Belanja Honorarium		2.820.000	2.820.000
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.820.000	2.820.000

	Belanja Barang dan Jasa		57.179.750	54.636.750
	Belanja Barang		53.699.750	53.436.750
	Belanja Barang Pakai Habis		53.699.750	53.436.750
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.125.350	2.928.350
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	936.400	936.400
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	450.000	450.000
		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	49.188.000	49.122.000
	Belana Perjalanan Dinas		3.480.000	1.200.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		3.480.000	1.200.000
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.280.000	-
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	1.200.000
	Penyediaan Sandang		29.999.850	21.365.000
	Belanja Barang dan Jasa		29.999.850	21.365.000
	Belanja Barang		29.999.850	21.365.000
	Belanja Barang Pakai Habis		29.999.850	21.365.000
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.600.000	19.225.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.999.850	1.760.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000	280.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100.000	100.000
		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.000.000	-
	Penyediaan Alat Bantu		50.000.000	47.640.530
	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000	3.140.530
	Belanja Barang		2.600.000	2.390.530
	Belanja Barang Pakai Habis		2.600.000	2.390.530
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.099.400	1.899.950
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.600	290.580

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000	200.000
	Belana Perjalanan Dinas		1.400.000	750.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		1.400.000	750.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.400.000	750.000
	Belanja Bantuan Sosial		46.000.000	44.500.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		46.000.000	44.500.000
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu		46.000.000	44.500.000
		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	46.000.000	44.500.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		30.000.000	28.205.300
	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000	13.205.300
	Belanja Barang		6.500.000	6.255.300
	Belanja Barang Pakai Habis		6.500.000	6.255.300
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.129.100	2.033.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	369.600	366.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.031.300	1.006.300
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	150.000	150.000
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.820.000	2.700.000
	Belanja Jasa		4.500.000	4.400.000
	Belanja Jasa Kantor		4.500.000	4.400.000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000	4.400.000
	Belana Perjalanan Dinas		4.000.000	2.550.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		4.000.000	2.550.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000	2.550.000
	Belanja Bantuan Sosial		15.000.000	15.000.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		15.000.000	15.000.000

	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	15.000.000	15.000.000
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	15.000.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	70.000.000	61.414.600
	Belanja Operasi	70.000.000	61.414.600
	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	11.414.600
	Belanja Barang	9.200.000	6.514.600
	Belanja Barang Pakai Habis	9.200.000	6.514.600
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	681.900
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	369.600
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	798.500
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.050.000
	Belanja Jasa	4.800.000	2.500.000
	Belanja Jasa Kantor	4.800.000	2.500.000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000
	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000	2.400.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000	2.400.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000	50.000.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	50.000.000	50.000.000
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	50.000.000	50.000.000
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	50.000.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	85.086.000	74.450.200

	Belanja Operasi		85.086.000	74.450.200
	Belanja Pegawai		2.820.000	2.820.000
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		2.820.000	2.820.000
	Belanja Honorarium		2.820.000	2.820.000
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.820.000	2.820.000
	Belanja Barang dan Jasa		82.266.000	71.630.200
	Belanja Barang		24.282.000	21.857.700
	Belanja Barang Pakai Habis		24.282.000	21.857.700
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.691.800	6.588.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	95.000	-
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.039.200	4.039.200
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	2.783.700
		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.856.000	8.446.800
	Belanja Jasa		3.780.000	3.736.500
	Belanja Jasa Kantor		3.780.000	3.736.500
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.780.000	3.736.500
	Belana Perjalanan Dinas		54.204.000	46.036.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		54.204.000	46.036.000
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.404.000	936.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.800.000	45.100.000
	Pemberian Layanan Kedaruratan		35.111.200	25.874.700
	Belanja Operasi		35.111.200	25.874.700
	Belanja Barang dan Jasa		35.111.200	25.874.700
	Belanja Barang		4.241.200	4.124.700
	Belanja Barang Pakai Habis		4.241.200	4.124.700

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.911.200	2.794.700
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	630.000	630.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	700.000	700.000
	Belanja Jasa		15.750.000	15.750.000
	Belanja Jasa Kantor		10.500.000	10.500.000
		Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.500.000	10.500.000
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		5.250.000	5.250.000
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.250.000	5.250.000
	Belana Perjalanan Dinas		15.120.000	6.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		15.120.000	6.000.000
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.120.000	-
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	6.000.000
	Pemberian Layanan Rujukan		23.704.200	22.859.900
	Belanja Operasi		23.704.200	22.859.900
	Belanja Barang dan Jasa		2.288.200	2.210.900
	Belanja Barang		2.288.200	2.210.900
	Belanja Barang Pakai Habis		2.288.200	2.210.900
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	781.000	718.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	476.600	462.300
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	780.600	780.600
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	250.000	250.000
	Belanja Modal		21.416.000	20.649.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		21.416.000	20.649.000
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		21.416.000	20.649.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		21.416.000	20.649.000
		Belanja Modal Mebel	11.488.000	11.249.000
		Belanja Modal Alat Pendingin	6.500.000	6.200.000

		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.428.000	3.200.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		498.800.400	494.792.947
	Pemberian Layanan Kedaruratan		69.999.900	67.677.080
	Belanja Operasi		69.999.900	67.677.080
	Belanja Barang dan Jasa		55.499.900	55.427.080
	Belanja Barang		1.499.900	1.478.880
	Belanja Barang Pakai Habis		1.499.900	1.478.880
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	670.200	669.170
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	330.000	320.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	299.700	289.710
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000	200.000
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-
	Belanja Jasa		54.000.000	53.948.200
	Belanja Jasa Kantor		54.000.000	53.948.200
		Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	54.000.000	53.948.200
	Belanja Bantuan Sosial		14.500.000	12.250.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		14.500.000	12.250.000
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu		14.500.000	12.250.000
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	14.500.000	12.250.000
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		428.800.500	427.115.867
	Belanja Operasi		428.800.500	427.115.867
	Belanja Barang dan Jasa		168.800.500	167.115.867
	Belanja Barang		150.494.500	149.937.200
	Belanja Barang Pakai Habis		150.494.500	149.937.200

		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	96.690.000	96.543.500
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.647.100	2.626.300
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	189.000	189.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.718.400	1.718.400
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	250.000	250.000
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	49.000.000	48.610.000
	Belanja Jasa		9.400.000	9.400.000
	Belanja Jasa Kantor		400.000	400.000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	200.000	200.000
		Honorarium Rohaniwan	200.000	200.000
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		9.000.000	9.000.000
		Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.800.000	1.800.000
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.700.000	3.700.000
		Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.000.000	2.000.000
		Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000	1.500.000
	Belana Perjalanan Dinas		8.906.000	7.778.667
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		8.906.000	7.778.667
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.906.000	7.778.667
	Belanja Hibah		260.000.000	260.000.000
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		260.000.000	260.000.000
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		260.000.000	260.000.000
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	260.000.000	260.000.000
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		188.301.300	180.861.485

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		188.301.300	180.861.485
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		36.100.000	34.989.300
	Belanja Operasi		36.100.000	34.989.300
	Belanja Pegawai		2.400.000	2.400.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		2.400.000	2.400.000
	Belanja Honorarium		2.400.000	2.400.000
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000	2.400.000
	Belanja Barang dan Jasa		33.700.000	32.589.300
	Belanja Barang		16.200.000	15.939.300
	Belanja Barang Pakai Habis		16.200.000	15.939.300
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.819.000	4.731.300
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	312.000	309.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.569.000	10.399.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000	500.000
	Belana Perjalanan Dinas		17.500.000	16.650.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		17.500.000	16.650.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.500.000	16.650.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		69.766.300	66.593.185
	Belanja Operasi		69.766.300	66.593.185
	Belanja Barang dan Jasa		69.766.300	66.593.185
	Belanja Barang		44.310.300	42.661.600
	Belanja Barang Pakai Habis		44.310.300	42.661.600
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.100.500	6.071.600
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	312.000	257.500

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.647.800	8.220.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000	500.000
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.750.000	27.612.500
		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-
	Belana Perjalanan Dinas		25.456.000	23.931.585
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		25.456.000	23.931.585
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.056.000	17.531.585
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.400.000	6.400.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		52.435.000	50.929.000
	Belanja Operasi		52.435.000	50.929.000
	Belanja Pegawai		2.400.000	2.400.000
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		2.400.000	2.400.000
	Belanja Honorarium		2.400.000	2.400.000
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000	2.400.000
	Belanja Barang dan Jasa		50.035.000	48.529.000
	Belanja Barang		24.832.000	24.684.000
	Belanja Barang Pakai Habis		24.832.000	24.684.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.389.900	2.389.900
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	851.600	851.600
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.067.500	2.067.500
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000	300.000
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.223.000	19.075.000
	Belanja Jasa		7.725.000	6.775.000
	Belanja Jasa Kantor		7.725.000	6.775.000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.575.000	6.625.000

		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	150.000	150.000
	Belana Perjalanan Dinas		17.478.000	17.070.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		17.478.000	17.070.000
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.228.000	960.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.250.000	16.110.000
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		30.000.000	28.350.000
	Belanja Operasi		30.000.000	28.350.000
	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000	8.350.000
	Belanja Barang		4.025.000	4.025.000
	Belanja Barang Pakai Habis		4.025.000	4.025.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	799.600	799.600
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	578.400	578.400
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	752.000	752.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	250.000	250.000
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.645.000	1.645.000
		Belanja Pakaian Dinas Lapangan	-	-
	Belanja Jasa		3.475.000	1.825.000
	Belanja Jasa Kantor		3.475.000	1.825.000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.475.000	1.825.000
	Belana Perjalanan Dinas		2.500.000	2.500.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		2.500.000	2.500.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000	2.500.000
	Belanja Bantuan Sosial		20.000.000	20.000.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		20.000.000	20.000.000

	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	20.000.000	20.000.000
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	20.000.000	20.000.000
	Program Penanganan Bencana	120.000.000	89.594.594
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	105.000.000	76.993.000
	Penyediaan Makanan	65.000.000	40.747.300
	Belanja Operasi	65.000.000	40.747.300
	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	40.747.300
	Belanja Barang	35.396.000	21.119.300
	Belanja Barang Pakai Habis	35.396.000	21.119.300
	Belanja Bahan-lsi Tabung Gas	2.088.750	-
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	625.000	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.764.450	1.718.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	877.800	877.800
	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30.040.000	18.523.500
	Belanja Jasa	27.000.000	18.060.000
	Belanja Jasa Kantor	27.000.000	18.060.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000	8.400.000
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	16.800.000	9.660.000
	Belana Perjalanan Dinas	2.604.000	1.568.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.604.000	1.568.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.404.000	468.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	1.100.000
	Penyediaan Sandang	10.000.000	9.988.700
	Belanja Operasi	10.000.000	9.988.700

	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000	9.988.700
	Belanja Barang		10.000.000	9.988.700
	Belanja Barang Pakai Habis		10.000.000	9.988.700
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.315.000	1.305.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	88.000	88.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	381.000	381.000
		Belanja Pakaian Olahraga	8.216.000	8.214.700
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		20.000.000	17.542.200
	Belanja Operasi		20.000.000	17.542.200
	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000	17.542.200
	Belanja Barang		11.875.000	11.417.200
	Belanja Barang Pakai Habis		11.875.000	11.417.200
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.275.000	4.200.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.865.500	2.855.500
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	222.800	-
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	986.700	986.700
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.525.000	3.375.000
	Belanja Jasa		4.625.000	3.875.000
	Belanja Jasa Kantor		4.625.000	3.875.000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.475.000	3.725.000
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	150.000	150.000
	Belana Perjalanan Dinas		3.500.000	2.250.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		3.500.000	2.250.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000	2.250.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial		10.000.000	8.714.800

	Belanja Operasi		10.000.000	8.714.800
	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000	8.714.800
	Belanja Barang		4.325.000	4.289.800
	Belanja Barang Pakai Habis		4.325.000	4.289.800
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.311.000	1.311.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.292.000	1.282.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	222.800	220.800
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	418.200	418.000
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.081.000	1.058.000
	Belanja Jasa		4.975.000	3.725.000
	Belanja Jasa Kantor		4.975.000	3.725.000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.975.000	3.725.000
	Belana Perjalanan Dinas		700.000	700.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		700.000	700.000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000	700.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		15.000.000	12.601.594
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		15.000.000	12.601.594
	Belanja Operasi		15.000.000	12.601.594
	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000	12.601.594
	Belanja Barang		1.726.000	475.000
	Belanja Barang Pakai Habis		1.726.000	475.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	216.000	211.000

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	288.000	264.000
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.222.000	-
	Belana Perjalanan Dinas		13.274.000	12.126.594
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		13.274.000	12.126.594
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.274.000	12.126.594
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		434.003.500	399.088.210
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		434.003.500	399.088.210
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		15.000.000	14.171.550
	Belanja Operasi		15.000.000	14.171.550
	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000	14.171.550
	Belanja Barang		4.000.000	3.171.550
	Belanja Barang Pakai Habis		4.000.000	3.171.550
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.454.700	1.454.700
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	874.500	871.950
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	81.000	-
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.489.800	744.900
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100.000	100.000
	Belanja Pemeliharaan		11.000.000	11.000.000
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		11.000.000	11.000.000

		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	11.000.000	11.000.000
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		419.003.500	384.916.660
	Belanja Operasi		419.003.500	384.916.660
	Belanja Pegawai		3.000.000	3.000.000
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		3.000.000	3.000.000
	Belanja Honorarium		3.000.000	3.000.000
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000	3.000.000
	Belanja Barang dan Jasa		416.003.500	381.916.660
	Belanja Barang		275.943.500	258.730.060
	Belanja Barang Pakai Habis		275.943.500	258.730.060
		Belanja Bahan-Bahan Baku	300.000	300.000
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	95.531.500	94.133.300
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	475.000	460.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.905.300	1.644.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.025.600	3.663.000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.376.200	6.851.760
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	220.000	200.000
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.230.000	4.100.000
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.350.000	4.230.000
		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	61.929.900	61.788.000

		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	93.600.000	81.360.000
		Belanja Pakaian Adat Daerah	-	-
	Belanja Jasa		88.428.000	74.100.000
	Belanja Jasa Kantor		15.928.000	14.600.000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.800.000	10.900.000
		Honor Rohaniwan	2.000.000	1.600.000
		Belanja Lembur	2.128.000	2.100.000
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		63.500.000	50.500.000
		Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	20.400.000	15.600.000
		Belanja Sewa Alat Pendingin	2.100.000	2.100.000
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000	22.800.000
		Belanja Sewa Sound System	8.000.000	7.000.000
		Belanja Sewa Proyektor/OHV/Infocus/LCD/HDT V	3.000.000	3.000.000
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya		9.000.000	9.000.000
		Belanja Sewa Alat Musik	9.000.000	9.000.000
	Belana Perjalanan Dinas		51.632.000	49.086.600
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		51.632.000	49.086.600
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.032.000	10.236.600
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.600.000	38.850.000
			5.093.068.611	4.825.424.420

Berdasarkan tabel di atas, diketahui alokasi anggaran yang tersedia pada Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023 untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup pada sasaran prioritas pada tahun 2023 adalah sebesar Rp **5.093.068.611** dan yang terealisasi sebesar Rp **4.825.424.420** ,- atau sebesar 94,74 %

BAB IV

PENUTUP

Sebagai wujud upaya penguatan kinerja dan akuntabilitasnya, maka Dinas Sosial Kota Metro telah menetapkan Indikator Sasaran yang didalamnya termasuk Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kota Metro. Indikator sasaran tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Dinas Sosial secara menyeluruh, sedangkan Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan Dinas Sosial menjalankan tugas, peran dan fungsinya sebagai bagian dari Pemerintah Kota Metro. Capaian indikator kinerja utama ini akan memberi gambaran sejauh mana Dinas Sosial dapat mencapai kinerja sesuai tugas yang diembannya.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat pencapaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis Dinas Sosial Kota Metro selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Metro 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Sosial Kota Metro dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang

dilakukan pengukuran kinerja. Dari indikator kinerja sasaran yang di ukur **(94,74 %)** telah mencapai kategori sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kota Metro didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Sosial Kota Metro Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp **5.093.068.611**. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp **4.825.424.420**.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pada kegiatan / kinerja masa yang akan datang.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Sosial Kota Metro untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang

Metro, Februari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kota Metro,



SRI AMANTO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680420 199303 1 009